



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



MANUAL IKU

**Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan
Penyuluhan Perikanan**

PK 11 Desember 2025

KATA PENGANTAR

Dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dalam semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tidak akan dapat berjalan dengan baik.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan yang merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Terkait dengan hal tersebut sebagai instrument untuk pengukuran capaian kinerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP), diperlukan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) BRPBATPP yang menampilkan informasi : nama indikator, definisi, formula perhitungan, satuan, tingkat validasi IK, sumber data, pola perhitungan, metode cascading, polarisasi, dan periode pelaporan. Hasil pengukuran kinerja akan menjadi bahan masukan bagi perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, serta perbaikan perencanaan kinerja di tahun mendatang.

Bogor, 11 Desember 2025

Kepala BRPBATPP



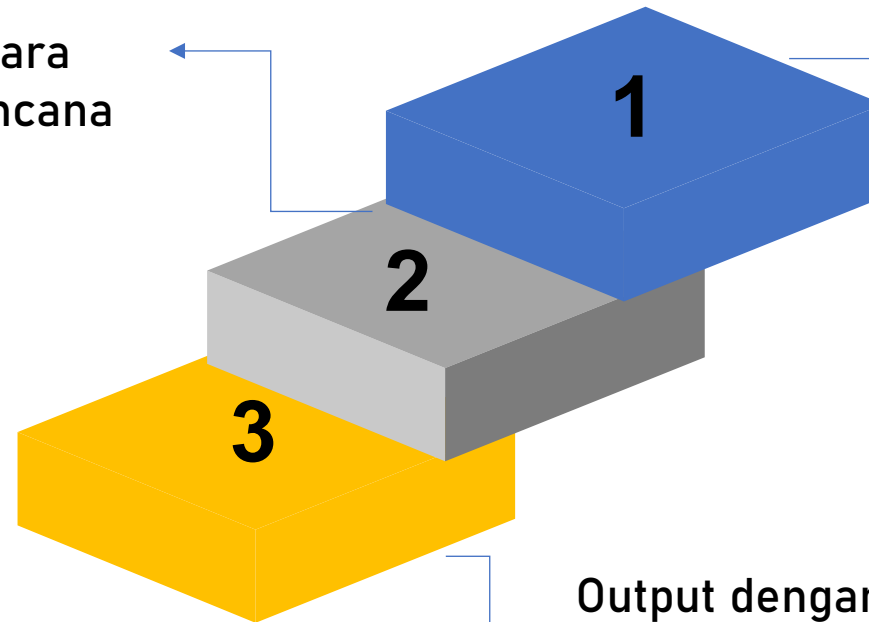
R. R. Sri Pudji Sinarni Dewi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Tingkat Validitas Indikator Kinerja	iii
Indikator Kinerja Kegiatan BRPBATPP TA 2025 (sesuai dengan PK 11 Desember 2025)	
1. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BRPBATPP (Kelompok)	5
2. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPBATPP (Kelompok)	8
3. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBATPP (Kelompok)	10
4. Gabungan kelompok dan/atau koperasi yang mendapatkan pendampingan dari Penyuluh KP di BRPBATPP (Unit)	12
5. Nilai PNBP Satker BRPBATPP (Rupiah Milyar)	14
6. Media penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di BRPBATPP (Paket)	16
7. Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBATPP (Orang)	18
8. Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPBATPP (Orang)	20
9. Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di BRPBATPP (Dokumen)	22
10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBATPP (%)	24
11. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBATPP (Nilai)	26
12. Penilaian Mandiri SAKIP BRPBATPP (Nilai)	29
13. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPBATPP (Nilai)	31
14. Indeks Profesionalitas ASN BRPBATPP (Indeks)	35
15. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPBATPP (%)	38
16. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPBATPP (%)	40
17. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPBATPP (%)	42

Tingkat Validitas Indikator Kinerja

Output dengan tingkat kendali rendah, yaitu hasil / keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya dipengaruhi secara dominan oleh selain pemilik rencana Kinerja;



Outcome, yaitu hasil/ manfaat/ dampak yang diharapkan dalam jangka pendek, menengah atau panjang;

Output dengan tingkat kendali tinggi, yaitu hasil / keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya dipengaruhi secara dominan oleh pemilik rencana Kinerja.

1



**Indikator Kinerja :
Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku
Pendukung yang Disuluh BRPBATPP
(Kelompok)**

KODE IK SASARAN			IK UTAMA Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan			
1	Nama Indikator	:	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BRPBATPP (Kelompok)			
2	Definisi	:	Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang disuluh dan dibentuk pada tahun 2024 oleh Penyuluh Kelautan dan Perikanan. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan diantaranya seperti: Pendampingan kelompok, pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi/teknologi, pendampingan akses modal, pendampingan akses perizinan berusaha dan pendampingan manajemen usaha kelompok. Pelaksanaan pendampingan sesuai penugasan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat sebagai bagian dari bentuk pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Setiap kelompok memiliki kode Registrasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala BPPSDMKP/ Surat Kepala Pusat Penyuluhan KP tentang Pedoman Administrasi dan Profil Kelompok Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. CONTOH Kode Registrasi Kelompok : 2.1.12.05.0109.0214 2 : kelompok kelas lanjut (Menjelaskan Kelas Kelompok) 1 : POKDAKAN (Menjelaskan Jenis Usaha Kelompok) 12 : Provinsi Jawa Barat (Provinsi) 5 : Kabupaten Karawang (disesuaikan dengan kodefikasi pada masing- masing wilayah) 0109 : bulan dan tahun terbentuk 214 : bulan dan tahun dikukuhkan			
3	Formula Perhitungan	:	Jumlah kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang telah disuluh dan disusun profil kelompoknya sesuai pedoman penyusunan profil yang disahkan oleh Koordinator Penyuluh Perikanan dan Kepala UPT Penyuluhan KP.			
4	Satuan	:	Kelompok			
5	Tingkat Validitas IK	:	(X) Output kendali tinggi		() Output kendali rendah	() Outcome
6	Sumber Data	:	BRPBATPP			
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi		() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir
8	Polarisasi	:	(X) Maximize		() Minimize	() Stabilize
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

KODE IK SASARAN			IK UTAMA Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan																			
10	Bukti Dukung	:	1. Data Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang disuluh, 2. Dokumen penyampaian data dari Kepala Satker kepada Kepala Pusat/ Eselon II 3. Data yang disajikan legal (dokumen/matrik) ditandatangani Kepala Satker																			

No.	UPT Penyuluhan KP	Provinsi	Kab/ Kota	Nama Kelompok	Nama Ketua Kelompok	NIK	Jenis Kelamin Ketua Kelompok (L/P)	Kelas Kelompok	Skor Penilaian Kelas Kelompok	NO Registrasi Kelompok	Bidang Usaha: (Budidaya ; Penangkapan; Pengolahan/ Pemasaran; Garam, Wisata Bahari, Pengawasan, dan Konservasi)	Jumlah Total Pengurus Dan Anggota Kelompok			Alamat Sekretariat Kelompok	Desa	Kecamatan	Nama Penyuluh Pendamping	No. Tlp. Penyuluh Pendamping	Status Penyuluh	Link Profil Kelompok	Link BA Pembentukan / Piagam Pengukuhan/ Sertifikat Apresiasi Pembentukan	Link Piagam Kelas Kemampuan Kelompok Terakhir/ Sertifikat Apresiasi Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok
												L	P	Jumlah									
(1).	(2).	(3).	(4).	(5).	(6).	(7).	(8).	(9).	(10).	(11).	(12).	(13).	(14).	(15).	(16).	(17).	(18).	(19).	(20).	(21).	(22).	(23).	(24).
1.																							
2.																							
3.																							
Dst.																							

2



**Indikator Kinerja :
Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku
Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya
oleh BRPBATPP (Kelompok)**

KODE IK SASARAN			IK UTAMA Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan							
1	Nama Indikator	:	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPBATPP (Kelompok)							
2	Definisi	:	Jumlah kelompok pelaku usaha/pelaku pendukung kelautan dan perikanan yang meningkat kelasnya setelah mendapatkan pendampingan penyuluh Kelautan dan Perikanan, dengan kriteria sesuai Permen KP no 28 tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan, dimana pengukuhan dilakukan oleh Kepala desa/lurah, camat, Kepala Dinas yang membidangi urusan perikanan setempat, Kepala BPPSDMKP sesuai dengan kriteria kelas kemampuan kelompok yang dikukuhkan dan mendapatkan piagam pengukuhan/ sertifikat apresiasi peningkatan kelas kemampuan kelompok.							
3	Formula Perhitungan	:	Hitung Jumlah kelompok pelaku usaha/ pelaku pendukung kelautan dan perikanan yang meningkat kelas kemampuan kelompoknya dan memenuhi kriteria peningkatan kelas (kelas pemula ke lanjut, kelas lanjut ke madya, kelas madya ke utama) dan jumlah pelaku usaha/ pelaku pendukung yang telah dilakukan pendampingan dan penilaian serta dalam proses penetapan, diperiode triwulan sesuai dengan Permen KP no. 28 Tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan.							
4	Satuan	:	Kelompok							
5	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi		() Output kendali rendah		(X) Outcome			
6	Sumber Data	:	BRPBATPP							
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi		() Rata-Rata		(X) Nilai Posisi Akhir			
8	Polarisasi	:	(X) Maximize		() Minimize		() Stabilize			
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan		(X) Triwulanan		() Semesteran		() Tahunan	
10	Bukti Dukung	:	1. Data Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang meningkat, beserta nama penyuluh perikanan 2. Data yang disajikan legal (dokumen/matrik) ditandatangani Kepala Satker 3. Dokumen penyampaian data dari Kepala Satker kepada Kepala Pusat/ Eselon II							

No.	UPT Penyuluhan KP	Provinsi	Kab/Kota	Nama Kelompok	Nama Ketua Kelompok	NIK Ketua Kelompok	Alamat Sekretariat Kelompok	Desa	Kecamatan	Bidang Usaha: (Budidaya ; Penangkapan; Pengolahan/ Pemasaran;Garam, Wisata Bahari, Pengawasan, dan Konservasi)	No Piagam Pengukuhan Kelompok (oleh instansi yg mengukuhkan)	Nomor Registrasi Kelompok yg ditingkatkan	Tanggal Pengukuhan Pembentukan Kelompok (Ketika Pertama kali dibentuk/ Kenaikan kelas Sebelumnya)	Skor Kelas Kelompok				Piagam Kenaikan Kelas Kelompok				Nama Penyuluh Pendamping	Status Penyuluh	No. Tlp. Penyuluh
														Semula		Menjadi		Nomor Piagam Kenaikan Kelas	Tanggal Piagam	Jabatan Pejabat yang Mengesahkan	Link Piagam/ sertifikat apresiasi			
														Nilai (Skor)	Kelas Kelompok (pemula, lanjut, madya)	Nilai (Skor)	Kelas Kelompok (lanjut, madya, utama)							
(1).	(2).	(3).	(4).	(5).	(6).	(7).	(8).	(9).	(10).	(11).	(12).	(13).	(14).	(15).	(16).	(17).	(18).	(19).	(20).	(21).	(22).	(23).	(22).	(23).
1.											Nomor pengukan Pemula		tanggal Pemula		Pemula		Madya	Nomor Madya	Tanggal madya					

3



**Indikator Kinerja :
Kelompok Pelaku Usaha dan/atau
Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh
BRPBATPP (Kelompok)**

KODE IK SASARAN		IK UTAMA Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan							
1	Nama Indikator	:	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBATPP (Kelompok)						
2	Definisi	:	Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung kelautan dan perikanan yang dibentuk setelah mendapatkan pendampingan oleh Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang dilakukan pada tahun sebelumnya dan dibentuk pada tahun berjalan, dengan kriteria pembentukan kelompok berdasarkan Permen KP no 28 tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan.						
3	Formula Perhitungan	:	Hitung Jumlah kelompok pelaku usaha/pelaku pendukung kelautan dan dan perikanan yang dibentuk/ditumbuhkan dan memenuhi kriteria pembentukan kelompok dan/atau telah dikukuhkan oleh Instansi yang berwenang mengukuhkan berdasarkan Permen KP no 28 tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan						
4	Satuan	:	Kelompok						
5	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi		(X) Output kendali rendah		() Outcome		
6	Sumber Data	:	BRPBATPP						
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi		() Rata-Rata		(X) Nilai Posisi Akhir		
8	Polarisasi	:	(X) Maximize		() Minimize		() Stabilize		
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan		(X) Triwulanan		() Semesteran		() Tahunan
10	Bukti Dukung	:	1. Data Kelompok pelaku usaha/pelaku pendukung yang dibentuk (ditambahkan kolom yang berisi Berita Acara Pembentukan beserta nama Penyuluh Kelautan dan Perikanan dan/atau piagam pengukuhan kelompok) 2. Data yang disajikan legal (dokumen/matrik) ditandatangani Kepala Satker 3. Dokumen penyampaian data dari Kepala Satker kepada Kepala Pusat/Eselon II						

No	UPT Penyuluhan KP	Provinsi	Kab/Kota	Nama Kelompok	Jumlah Pengurus dan Anggota Kelompok			BA Pembentukan Kelompok			Alamat	Desa	Kecamatan	Bidang Usaha: (Budidaya ; Penangkapan; Pengolahan/ Pemasaran;Garam, Wisata Bahari,	Nama Penyuluh Pendamping	Status Penyuluh	No. Telp Penyuluh
					L	P	Jumlah	Nomor BA Pembentukan	Tanggal Pembentukan	Link BA							
(1).	(2).	(3).	(4).	(5).	(6).	(7).	(8).	(9).	(10).	(12).	(13).	(15).	(16).	(17).	(18).	(19).	(20).
1																	
2																	

4



Indikator Kinerja :
Gabungan kelompok dan/atau
koperasi yang mendapatkan
pendampingan dari Penyuluh KP di
BRPBATPP (Unit)

KODE IK SASARAN			IK UTAMA Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan			
1	Nama Indikator	:	Gabungan kelompok dan/atau koperasi yang mendapatkan pendampingan dari Penyuluh KP di BRPBATPP (Unit)			
2	Definisi	:	Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang didampingi oleh penyuluh kelautan dan perikanan dengan kriteria sesuai dengan Permen KP no 28 tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.			
3	Formula Perhitungan	:	Jumlah Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan Penyuluh kelautan dan perikanan			
4	Satuan	:	Unit			
5	Tingkat Validitas IK	:	(X) Output kendali tinggi	() Output kendali rendah	() Outcome	
6	Sumber Data	:	BRPBATPP			
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct			() Non-Direct
11	Bukti Dukung	:	1. Data Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang didampingi oleh penyuluh kelautan dan perikanan; 2. Data yang disajikan legal (dokumen/matrik) ditandatangani Kepala Satker 3. Dokumen penyampaian data dari Kepala Satker kepada Kepala Pusat/Eselon II			

5



**Indikator Kinerja :
Nilai PNBP Satker BRPBATPP
(Rupiah Milyar)**

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan			
1	Nama Indikator	:	Nilai PNBP Satker BRPBATPP (Rupiah Milyar)		
2	Definisi	:	• Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. • Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. • Dasar hukum : a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP b. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan c. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah		
3	Formula Perhitungan	:	Nilai PNBP Sektor KP = Nilai PNBP SDA + Nilai PNBP Lainnya		
4	Satuan	:	Rupiah Milyar		
5	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi	(X) Output kendali rendah	() Outcome
6	Sumber Data	:	BRPBATPP		
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir
8	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran () Tahunan
10	Bukti Dukung	:	Data Realisasi Pendapatan dari aplikasi OM SPAN per tanggal 10 bulan berikutnya dan/atau surat penyampaian realisasi PNBP dari Sekretariat Badan		

6



**Indikator Kinerja :
Media penyuluhan sesuai dengan
kebutuhan pelaku usaha di
BRPBATPP (Paket)**

KODE IK SASARAN			IK UTAMA Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan			
1	Nama Indikator	:	Media penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di BRPBATPP (Paket)			
2	Definisi	:	Media penyuluhan merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor KP yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pelaku usaha. Media penyuluhan terdiri atas media tercetak, media terdengar dan media tertayang. Media tercetak misalnya folder, leaflet, poster dan lainnya. Media terdengar antara lain naskah siaran radio. Media tertayang antara lain video, podcast dan lainnya.			
3	Formula Perhitungan	:	Jumlah media yang disusun dan digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan oleh Penyuluh Perikanan kepada pelaku usaha sektor KP sesuai binaannya			
4	Satuan	:	Paket			
5	Tingkat Validitas IK	:	(X) Output kendali tinggi	() Output kendali rendah	() Outcome	
6	Sumber Data	:	BRPBATPP			
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct			() Non-Direct
11	Bukti Dukung	:	Media penyuluhan dalam bentuk <i>softcopy</i> / file yang telah disusun oleh Satminkal sesuai kebutuhan pelaku usaha untuk digunakan Penyuluh Perikanan melakukan penyuluhan			

7



**Indikator Kinerja :
Jumlah Penyuluh Perikanan yang
Lulus Penilaian Kompetensi di
BRPBATPP (Orang)**

KODE IK SASARAN			IK UTAMA Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan			
1	Nama Indikator	:	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBATPP (Orang)			
2	Definisi	:	Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan PNS yang mengikuti lulus penilaian kompetensi sesuai dengan persyaratan yang berlaku, lulus dan mendapatkan sertifikat kompetensi/ Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Biro SDMAO KKP.			
3	Formula Perhitungan	:	Hitung jumlah penyuluh kelautan dan perikanan PNS yang lulus penilaian kompetensi yang dilakukan oleh <i>Assesment Center</i> KKP			
4	Satuan	:	Orang			
5	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi	(X) Output kendali rendah	() Outcome	
6	Sumber Data	:	BRPBATPP			
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct			() Non-Direct
11	Bukti Dukung	:	1. Data Penyuluh Perikanan PNS yang lulus penilaian Kompetensi <i>by name by address</i> beserta link Sertifikat/ Surat Keterangan dari Biro SDMAO KKP. 2. Data yang disajikan merupakan legal terdapat pengesahan pimpinan			

8



**Indikator Kinerja :
Jumlah Penyuluh Kelautan dan
Perikanan yang Lulus Pelatihan
Teknis di BRPBATPP (Orang)**

KODE IK SASARAN			IK UTAMA Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan			
1	Nama Indikator	:	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPBATPP (Orang)			
2	Definisi	:	- Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang mengikuti dan lulus pelatihan teknis dalam 2 tahun terakhir dan mendapatkan sertifikat pelatihan teknis kelautan dan perikanan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan yang memiliki kewenangan sesuai aturan yang berlaku. - Jumlah penyuluh kelautan dan perikanan merupakan jumlah penyuluh kelautan dan perikanan per Januari 2025			
3	Formula Perhitungan	:	Hasil perhitungan penyuluh yang mengikuti dan lulus pelatihan teknis serta mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan yang berwenang			
4	Satuan	:	Orang			
5	Tingkat Validitas IK	:	(X) Output kendali tinggi	() Output kendali rendah	() Outcome	
6	Sumber Data	:	BRPBATPP			
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct			() Non-Direct
11	Bukti Dukung	:	1. Data Penyuluh kelautan dan Perikanan yang lulus Sertifikasi Pelatihan Teknis <i>by name by address</i> beserta link Sertifikat/ Surat Keterangan dari Penyelenggara. 2. Data yang disajikan merupakan legal terdapat pengesahan pimpinan			

9



**Indikator Kinerja :
Kemitraan yang Disepakati
dan/atau Ditindaklanjuti di
BRPBATPP (Dokumen)**

KODE IK SASARAN			IK MANDATORY Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan			
1	Nama Indikator	:	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di BRPBATPP (Dokumen)			
2	Definisi	:	Jumlah dokumen kerja sama nasional dan/atau internasional antara BRPBATPP dengan pihak mitra kerja sama yang ditandatangani/ disepakati sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23/PERMEN KP/2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.			
3	Formula Perhitungan	:	Hasil inventarisasi dan perhitungan dokumen Kerjasama antara BRPBATPP dengan para pihak mitra kerja sama			
4	Satuan	:	Dokumen			
5	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi	(X) Output kendali rendah	() Outcome	
6	Sumber Data	:	BRPBATPP			
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Semesteran	() Triwulanan	(X) Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct			() Non-Direct
11	Bukti Dukung	:	1. Dokumen kesepakatan yang telah ditandatangani 2. Laporan kerja sama yang ditandatangani Kepala Satker			

10



**Indikator Kinerja :
Persentase Rekomendasi Hasil
Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk
Perbaikan Kinerja BRPBATPP (%)**

KODE IK SASARAN			IK MANDATORY Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan							
1	Nama Indikator	:	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBATPP (%)							
2	Definisi	:	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh BRPBATPP sampai dengan waktu pengukuran.							
3	Formula Perhitungan	:	Jumlah Rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh BRPBATPP Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada BRPBATPP X 100%							
4	Satuan	:	%							
5	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi		(X) Output kendali rendah		() Outcome			
6	Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal							
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi		() Rata-Rata		(X) Nilai Posisi Akhir			
8	Polarisasi	:	(X) Maximize		() Minimize		() Stabilize			
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan		(X) Triwulanan		() Semesteran		() Tahunan	
10	Metode Cascading	:	() Direct					(X) Non-Direct		
11	Bukti Dukung	:	Surat penyampaian hasil Rekomendasi Pengawasan dari Sekretariat BPPSDM KP							

11



**Indikator Kinerja :
Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran BRPBATPP (Nilai)**

KODE IK SASARAN			IK MANDATORY Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan																											
1	Nama Indikator	:	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBATPP (Nilai)																											
2	Definisi	:	Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran																											
3	Formula Perhitungan	:	- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. Nilai IKPA = $\sum_{n=1}^8 (Nilai\ Indikator_n \times Bobor\ Indikator_n) : Konversi\ Bobot - Dispensasi\ SPM$ <table><tr><th>No</th><th>Uraian Indikator IKPA</th><th>Bobot (%)</th></tr><tr><td>1</td><td>Revisi DIPA</td><td>10</td></tr><tr><td>2</td><td>Deviasi RPD</td><td>15</td></tr><tr><td>3</td><td>Penyerapan Anggaran</td><td>20</td></tr><tr><td>4</td><td>Belanja Kontraktual</td><td>10</td></tr><tr><td>5</td><td>Penyelesaian Tagihan</td><td>10</td></tr><tr><td>6</td><td>Pengelolaan UP dan TUP</td><td>10</td></tr><tr><td>7</td><td>Dispensasi SPM</td><td>(Pengurang Nilai IKPA)</td></tr><tr><td>8</td><td>Capaian Output</td><td>25</td></tr></table>	No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)	1	Revisi DIPA	10	2	Deviasi RPD	15	3	Penyerapan Anggaran	20	4	Belanja Kontraktual	10	5	Penyelesaian Tagihan	10	6	Pengelolaan UP dan TUP	10	7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)	8	Capaian Output	25
No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)																												
1	Revisi DIPA	10																												
2	Deviasi RPD	15																												
3	Penyerapan Anggaran	20																												
4	Belanja Kontraktual	10																												
5	Penyelesaian Tagihan	10																												
6	Pengelolaan UP dan TUP	10																												
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)																												
8	Capaian Output	25																												
4	Satuan	:	Nilai																											

KODE IK SASARAN			IK MANDATORY Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan			
5	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi	(X) Output kendali rendah		() Outcome
6	Sumber Data	:	Biro Keuangan (Aplikasi OMSPAN/Online Monitoring SPAN)			
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata		(X) Nilai Posisi Akhir
8	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize		() Stabilize
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	(X) Semesteran	() Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct			() Non-Direct
11	Bukti Dukung	:	Nota Dinas Biro Keuangan			

12



**Indikator Kinerja :
Penilaian Mandiri SAKIP BRPBATPP
(Nilai)**

KODE IK SASARAN			IK MANDATORY Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan																											
1	Nama Indikator	:	Penilaian Mandiri SAKIP BRPBATPP (Nilai)																											
2	Definisi	:	Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.																											
3	Formula Perhitungan	:	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal. <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 - 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 - 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 - 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 - 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 - 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 - 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>				Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan	A	>80 - 90	Memuaskan	BB	>70 - 80	Sangat Baik	B	>60 - 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 - 50	Kurang	D	0 - 30	Sangat Kurang
Kategori	Nilai	Predikat																												
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan																												
A	>80 - 90	Memuaskan																												
BB	>70 - 80	Sangat Baik																												
B	>60 - 70	Baik																												
CC	>50-60	Cukup																												
C	>30 - 50	Kurang																												
D	0 - 30	Sangat Kurang																												
4	Satuan	:	Nilai																											
5	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi	(X) Output kendali rendah	() Outcome																									
6	Sumber Data	:	Sekretariat BPPSDM KP																											
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir																									
8	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize																									
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan																								
10	Metode Cascading	:	(X) Direct			() Non-Direct																								
11	Bukti Dukung	:	Surat Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri SAKIP dari Sekretariat BPPSDM KP																											

30

13



**Indikator Kinerja :
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
BRPBATPP (Nilai)**

KODE IK SASARAN			IK MANDATORY Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan												
1	Nama Indikator	:	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPBATPP (Nilai)												
2	Definisi	:	• Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk Menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. • Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggara dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator. • Kategori : 1. Sangat Baik, apabila NKPA > 90; 2. Baik, apabila NKPA >80-90; 3. Cukup, apabila NKPA >60-80 4. Kurang, apabila NKPA >50-60 5. Sangat Kurang, apabila NKPA <50												
3	Formula Perhitungan	:	NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut : <table><tr><th>Variabel</th><th>Uraian</th><th>Bobot</th></tr><tr><td>Efektivitas (75)</td><td>1. Capaian RO</td><td>75</td></tr><tr><td rowspan="2">Efisiensi (25)</td><td>1. Penggunaan SBK</td><td>10</td></tr><tr><td>2. Efisiensi SBK</td><td>15</td></tr></table>	Variabel	Uraian	Bobot	Efektivitas (75)	1. Capaian RO	75	Efisiensi (25)	1. Penggunaan SBK	10	2. Efisiensi SBK	15	A. Efektivitas 1) Capaian RO $CRO = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$ Keterangan : CRO : Capaian RO Tingkat Satker RVROi : Realisasi Volume Roi TVROi : Target Volume Roi n : Jumlah RO
Variabel	Uraian	Bobot													
Efektivitas (75)	1. Capaian RO	75													
Efisiensi (25)	1. Penggunaan SBK	10													
	2. Efisiensi SBK	15													

32

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan																											
		:	B. Efisiensi 1) Penggunaan SBK $P_{\text{penggunaan SBK}} = \left(\frac{\sum RO \text{ SBKK} + \sum RO \text{ SBKU}}{\sum RO \text{ SBKK dalam PMK} + \sum RO \text{ memenuhi kriteria SBKU}} \right) \times 100\%$ 2) Efisiensi SBK $E_{\text{SBK}} = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{\text{Indeks SBK}_i - \text{Indeks RA SBK}_i}{\text{Indeks SBK}_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$ Keterangan : E_{SBK} : Efisiensi SBK Tingkat Satuan Kerja Indeks SBKi : Indeks SBK RO I sesuai dengan PMK SBK Indeks RA SBKi : Indeks Realisasi RO I SBK n : Jumlah RO SBK Formula perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut : NKPA Satker = (CRO x W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} x W_{penggunaan_{SBK}}) + (NE_{ALokasi} x WE_{Alokasi}) <table><tr><th colspan="3">Keterangan :</th></tr><tr><td>NKPA Satker</td><td>:</td><td>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker</td></tr><tr><td>CRO</td><td>:</td><td>Capaian RO</td></tr><tr><td>Penggunaan_{SBK}</td><td>:</td><td>Penggunaan SBK</td></tr><tr><td>NE_{Alokasi}</td><td>:</td><td>Nilai Efisiensi Alokasi</td></tr><tr><td>W_{CRO}</td><td>:</td><td>Bobot Capaian RO</td></tr><tr><td>WPenggunaan_{SBK}</td><td>:</td><td>Bobot Penggunaan SBK</td></tr><tr><td>WE_{Alokasi}</td><td>:</td><td>Bobot Efisiensi Alokasi</td></tr></table>			Keterangan :			NKPA Satker	:	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker	CRO	:	Capaian RO	Penggunaan _{SBK}	:	Penggunaan SBK	NE _{Alokasi}	:	Nilai Efisiensi Alokasi	W _{CRO}	:	Bobot Capaian RO	WPenggunaan _{SBK}	:	Bobot Penggunaan SBK	WE _{Alokasi}	:	Bobot Efisiensi Alokasi
Keterangan :																													
NKPA Satker	:	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker																											
CRO	:	Capaian RO																											
Penggunaan _{SBK}	:	Penggunaan SBK																											
NE _{Alokasi}	:	Nilai Efisiensi Alokasi																											
W _{CRO}	:	Bobot Capaian RO																											
WPenggunaan _{SBK}	:	Bobot Penggunaan SBK																											
WE _{Alokasi}	:	Bobot Efisiensi Alokasi																											
4	Satuan	:	Nilai																										
5	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi	(X) Output kendali rendah	() Outcome																								

33

KODE IK SASARAN			IK MANDATORY Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan					
6	Sumber Data	:	Biro Keuangan (Aplikasi Monev Kemenkeu)					
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi		() Rata-Rata		(X) Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	(X) Maximize		() Minimize		() Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan		() Triwulanan		() Semesteran	(X) Tahunan
10	Metode Cascading		(X) Direct				() Non-Direct	
11	Bukti Dukung	:	Nota Dinas Biro Keuangan					

14



**Indikator Kinerja :
Indeks Profesionalitas ASN
BRPBATPP (Indeks)**

KODE IK SASARAN			IK UTAMA Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
1	Nama Indikator	:	Indeks Profesionalitas ASN BRPBATPP (Indeks)
2	Definisi	:	Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
3	Formula Perhitungan	:	• Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi (a) Kualifikasi, (b) Kompetensi; (c) Kinerja; dan (d) Disiplin. • Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi $IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j} = \text{Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j}$ $W_{2k} * R_{2k} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k}$ $W_{3l} * R_{3l} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l}$ $W_{4m} * R_{4m} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m}$

KODE IK SASARAN			IK UTAMA Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan							
4	Satuan	:	Indeks							
5	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi		(X) Output kendali rendah		() Outcome			
6	Sumber Data	:	Biro SDMAO							
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi		() Rata-Rata		(X) Nilai Posisi Akhir			
8	Polarisasi	:	(X) Maximize		() Minimize		() Stabilize			
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan		() Triwulanan		(X) Semesteran		() Tahunan	
10	Metode Cascading	:	(X) Direct					() Non-Direct		
11	Bukti Dukung	:	Surat Penyampaian Hasil Nilai IP ASN dari Sekretariat BPPSDM KP							

15



**Indikator Kinerja :
Persentase Rencana Umum
Pengadaan PBJ yang Diumumkan
pada SIRUP BRPBATPP (%)**

KODE IK SASARAN			IK UTAMA Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan					
1	Nama Indikator	:	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPBATPP (%)					
2	Definisi	:	Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.					
3	Formula Perhitungan	:	Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP Pagu Pengadaan Barang/Jasa × 100% Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini					
4	Satuan	:	%					
5	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi		(X) Output kendali rendah		() Outcome	
6	Sumber Data	:	Biro Umum dan PBJ					
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi		() Rata-Rata		(X) Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	(X) Maximize		() Minimize		() Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan		(X) Triwulanan		() Semesteran () Tahunan	
10	Metode Cascading	:	(X) Direct				() Non-Direct	
11	Bukti Dukung	:	Surat/Nota Dinas Biro Umum dan PBJ					

39

16



**Indikator Kinerja :
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN
BRPBATPP (%)**

KODE IK SASARAN			IK UTAMA Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan			
1	Nama Indikator	:	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPBATPP (%)			
2	Definisi	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku			
3	Formula Perhitungan	:	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut : Formula 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025 a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2026 (bobot 5%) b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%) 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%) 3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%) 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%) 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%) 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)			
4	Satuan	:	%			
5	Tingkat Validitas IK	:	(X) Output kendali tinggi	() Output kendali rendah	() Outcome	
6	Sumber Data	:	Sekretariat BPPSDM KP			
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct			() Non-Direct
11	Bukti Dukung	:	Surat Sekretaris BPPSDM KP tentang Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDM KP			

41

17



**Indikator Kinerja :
Persentase Layanan Dukungan
Manajemen Internal BRPBATPP (%)**

KODE IK SASARAN			IK MANDATORY Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan			
1	Nama Indikator	:	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPBATPP (%)			
2	Definisi	:	Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan perencanaan dan penganggaran internal, layanan umum, layanan hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal, layanan kehumasan dan protokoler, layanan data dan informasi, layanan monev (termasuk pelaporan), pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan perkantoran			
3	Formula Perhitungan	:	A. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. B. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, <i>screen shoot</i> aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain. <i>Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal</i> = $\frac{\text{Jumlah realisasi dokumen hasil layanan}}{\text{jumlah target dokumen hasil layanan}} \times 100\%$			
4	Satuan	:	%			
5	Tingkat Validitas IK	:	(X) Output kendali tinggi	() Output kendali rendah		() Outcome
6	Sumber Data	:	BRPBATPP			
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata		(X) Nilai Posisi Akhir
8	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize		() Stabilize
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan
10	Bukti Dukung	:	Dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal satker dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang ditandatangani Pimpinan Satker.			



Terima Kasih.